

**PELAKSANAAN HAK DESAIN INDUSTRI KENDANG JIMBE  
BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI  
(Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh :

**YUDHA BAGUS ANGGORO**

**115010107113040**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Persetujuan .....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel .....	v
Daftar Gambar .....	vi
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Desain Industri dan Hak Desain Industri .....	8
B. Pengertian Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri .....	11
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Metode Pendekatan .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Teknik Analisis Data .....	37
G. Definisi Operasional .....	37

H. Sistematika Penulisan .....	39
--------------------------------	----

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar .....	41
B. Pelaksanaan Hak Desain Industri Pada Produk Kerajinan Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar .....	49
C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Hak Desain Industri Pada Produk Kerajinan Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar .....	54

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural .....	43
Tabel 2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan .....	43
Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	44
Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	44
Tabel 5. Perkembangan Industri Komoditi Andalan Kendang Jimbe Kota Blitar, 2013-2017 .....	57
Tabel 6. Industri Komoditi Andalan per Kecamatan Di Kota Blitar 2017 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Blitar ..... 42



## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, inayah serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Hak Desain Industri Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar)” dapat terselesaikan dengan baik.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan tanpa bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan dengan setulus hati, kepada:

1. Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Agus Yulianto, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Lutfi Effendi, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Setyono Selaku Kepala Seksi Perindustrian Kantor Disperindag Kota Blitar;
6. Ayah dan Ibu, telah memberikan nasehat-nasehat yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dimas, Ayu, Daut, Risang Selaku Adik dan sahabat yang selalu menemani penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas keikhlasan yang telah diberikan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Malang,        Desember 2018

Penulis





## RINGKASAN

Yudha Bagus Anggoro, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2018, PELAKSANAAN HAK DESAIN INDUSTRI KENDANG JIMBE BERDASARKAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar), Agus Yulianto, SH.,MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan tentang pelaksanaan Hak Desain Industri Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Pemilihan tema tersebut di latar belakang untuk meningkatkan hak desain industri kendang jimbe di kota blitar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Desain Industri pada produk Kerajinan Kendang Jimbe Berdasarkan pasal 6 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar ? (2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Hak Desain Industri pada Produk Kerajinan Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang desain Industri di Kota Blita?

Dalam Penulisan Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan yuridis sosiologis. Data Primer dan data sekunder yang di peroleh akan di analisis data yang bertujuan menggambarkan secara cernat yang di peroleh dari hasil wawancara untuk kemudian mengolah kata wawancara menjadi kesatuan yang utuh terkait dengan tema penelitian

Penelitiandan Pembahasan, di peroleh atas jawaban atas permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Hak Desain Industri Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yaitu kurang Optimal di kota blitar pada kendang jimbe di karenakan sulitnya pendaftaran dan biaya yang mahal menjadikan pendesain yang enggan untuk membuat hasil karya desainnya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tidak hanya dikenal sebagai Kota Pariwisata, di bidang perdagangan Kota Blitar juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satunya adalah industri kerajinan dari bahan kayu, terutama kendang jimbe. Daerah yang cukup terkenal sebagai penghasil kendang jimbe adalah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen kidul Kota Blitar. Di daerah ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin kendang, juga merupakan sentra kerajinan bubut di Kota Blitar. Dari sebuah studi universitas ternama di Indonesia, Blitar memiliki 124 unit industri dengan kurang lebih 1.500 pekerja. Setiap unit industri pengrajin kendang ada antara dua sampai tiga puluh pekerja. Industri dibidang kerajinan kendang jimbe ini paling banyak adalah industri rumahan dengan tenaga kerja berasal dari keluarga. Kegiatan usaha kerajinan kendang ini sudah ada sejak tahun 1974. Dan berkat kerajinan usaha kendang ini Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadikan kawasan ini sebagai kampung wisata.<sup>1</sup>

Hasil observasi awal peneliti di beberapa sentra kerajinan kendang jimbe menemukan bahwa desain atau perancangan dalam pengembangan produk tersebut adalah pemilik usaha dan terkadang dibantu oleh para pengrajin. Meski kendang jimbe yang bentuknya sudah pakem, namun perancang dapat mengreasikannya pada media maupun pada motif atau teknik hiasannya. Untuk pengembangan media, meliputi pemilihan bahan semisal kayu mahoni dan

---

<sup>1</sup> Aunur Rofiq, 14 Februari 2017, *Kendang Jimbe, Kerajinan Ikon Wisata Kota Blitar*, <http://www.jatimtimes.com/baca/151210/20170214/152737/kendang-jimbe-kerajinan-ikon-wisata-kota-blitar/>

kulit kambing. Kayu mahoni dipilih karena selain mudah dikelolah, mendapatkannya juga mudah. Sedang kulit kambing yang dipilih ialah kulit kambing yang siap pakai sehingga dapat lebih menghemat waktu dan tenaga. Dalam pembuatan kendang jimbe, sebenarnya kayu yang baik digunakan adalah kayu nangka, sebab hasilnya dapat menimbulkan bunyi yang lebih nyaring, namun untuk mendapatkannya memang sangatlah sulit. Pengembangan motif di beberapa sentra kerajinan kendang jimbe ini meliputi motif, *dolphin*, cicak, kura-kura, palem, gajah dan *scorpion*, sedang teknik menghiasnya dengan teknik ukir, *painting*, dan *carving*. Seringkali motif dan teknik hiasan mengikuti permintaan pemesan karena banyaknya pelanggan, sehingga yang dibuat di tempat kerajinan ini tidak melulu berupa motif dan teknik yang dimiliki oleh kerajinan tersebut.

Hasil observasi awal juga menunjukkan bahwa beberapa pengrajin kendang jimbe di Kecamatan Kepanjen kidul Kota Blitar tidak mendaftarkan desain terbaru produk kendang jimbenya untuk mendapatkan hak desain industri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sampai 5 Undang-Undang “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,”

“bahwa desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Permohonan adalah permintaan pendaftaran Desain Industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Pemohon adalah pihak yang mengajukan

Permohonan. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>2</sup>”

Fenomena ini tentu menarik untuk diteliti, mengingat bahwa dikeluarkannya “Undang-Undang RI Nomer. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri” justru bertujuan sebagai upaya untuk menjamin perlindungan hak Pendesain dan untuk menetapkan hak serta kewajiban sekaligus menjaga supaya pihak yang tidak memiliki hak tidak dapat menyalah gunakan hak Desain Industri. Adanya peraturan mengenai Desain Industri ini dimaksudkan untuk memberi landasan atau dasar yang efektif bagi perlindungan segala bentuk usaha penjiplakan, pembajakan, serta peniruan Desain Industri yang sudah ada sebelumnya dan sudah dikenal secara luas. Prinsip dalam pengaturannya yaitu dengan pengakuan kepemilikan atas suatu karya intelektual yang berkesan estetik dan juga dapat diproduksi secara terus menerus yang memberikan hasil berupa barang. Adanya peraturan ini selain untuk menjamin suatu perlindungan hukum, juga bertujuan sebagai perangsang aktivitas kreatifitas dari Pendesain agar dapat terus menciptakan desain-desain baru yang lebih baik dan lebih inovatif. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang desain Industri ini juga merupakan wujud dari iklim yang memajukan semangat terciptanya desain-desain baru. perlindungan atas Hak Desain Industri diberikan oleh Negara Indonesia dengan yang bersangkutan memintanya melalui prosedur pendaftaran oleh pendesain.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1 angka 1-5.

<sup>3</sup> *Ibid*, Penjelasan Umum.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam Perindustrian dan Disperindag Kota Blitr memiliki tanggung jawab untuk dapat memberi kepada Pendesain perlindungan hukum terhadap hasil desain industrinya, khususnya di Kendang Jimbe unggulannya, khususnya kendang jimbe. Permasalahan yang dapat dikaji adalah sejauhmana peran Disperindag dalam menerapkan Undang-Undang RI “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri” tentang hak pendesain kendang jimbe di Kota Blitar untuk memperoleh hak desain industri. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang “Nomer. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri” yang berbunyi:

- (1) “Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain.
- (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.<sup>4</sup>”

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauhmana upaya Pemerintah khususnya Disperindag dalam melaksanakan pemberian hak desain industri, khususnya pada desain produk kerajinan kendang. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul: **PELAKSANAAN HAK DESAIN INDUSTRI KENDANG JIMBE BERDASARKAN PASAL 6 “UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI” (Studi diDinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar).**

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar?”
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan mendeskripsikan pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.”
2. Untuk mengkaji dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.”

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil yang di peroleh diharapkan dapat menjadi manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:



## 1. Manfaat teoritis

Untuk menambah pengetahuan atau wacana mengenai kajian yuridis sosiologis mengenai pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.”

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Pemerintah Kota Blitar:

Hasil yang di peroleh ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Pemerintah Kota Blitar, khususnya Disperindag Kota Blitar tentang pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.”

### b. Bagi Pengrajin Kendang Jimbe:

Agar para pengrajin, khususnya pendesain kendang jimbe di Kota Blitar dapat memahami pentingnya perlindungan atas desain terbaru produk kerajinannya sehingga terdorong untuk memiliki hak desain industri berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Desain Industri dan Hak Desain Industri

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri dari beberapa bidang, dan antara bidang satu dengan yang lainnya meski memiliki fokusnya masing-masing tetap memiliki hubungan dan kemiripan, kemiripan inilah terkadang yang membuat masyarakat awam kurang memahami adanya perbedaan arti serta fungsi dari masing-masing bidang HKI tersebut.”

Seperti halnya Hak Cipta yang lebih dikenal oleh masyarakat memiliki kemiripan dengan Desain Industri bahkan terkadang dianggap sama antara keduanya, hal ini membuat masyarakat kurang memahami dan menimbulkan kesalahan paham dalam mengetahui bahwa Hak Cipta dengan Desain Industri tersebut dua bidang yang berbeda dan memiliki lingkup atau fokus yang beda.

Perbandingan antara Hak Cipta dengan Desain Industri, sebagaimana disampaikan oleh NK Supasti D dalam makalah seminar HKI, Denpasar (2003), ialah dimana Hak Cipta obyek perlindungannya lebih kepada suatu karya yang bersifat seni, sedangkan Desain Industri obyeknya karya tentang bentuk, bentuk tersebut memiliki nilai estetika yang kemudian dibuat untuk menghasilkan komoditas industri (*mass product*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> NK Supasti D, dkk, *Bahan Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2009, h.83

Selain itu keduanya memiliki perbedaan dimana Desain Industri mendapatkan perlindungan dengan pihak pendesain mengajukan permohonan pendaftaran disertai dengan proses pemeriksaannya di Direktorat Jenderal HKI, sedangkan Hak Cipta pendaftarannya tidak disertai dengan proses pemeriksaan.

Agar lebih memahami mengenai pengertian “Desain Industri dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desain Industri tahun 2000”:

“Desain industri ialah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Hak Desain Industri “dalam Pasal 1 ayat (5) UU Desain Industri tahun 2000,” yakni “hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut”. Secara sederhana dalam pasal ini menyatakan bahwa hak desain industri dikatakan sebagai hak eksklusif karena hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara.

## B. Pengertian Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri

Pada Pasal 1 ayat (2) “UU Desain Industri tahun 2000,” yang disebut dengan Pendesaian merupakan “seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Selain yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut, Pendesain dapat diartikan bahwa dialah yang membuat kreasi yang berupa desain baru (bukan jiplakan) sehingga memiliki nilai estetis yang kemudian dapat diproduksi dan dipergunakan.”

Dalam Pasal “6 ayat (1) UU Desain Industri tahun 2000 disebutkan bahwa Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain”. Dan dalam Pasal 12 UU Desain Industri tahun 2000 menyebutkan bahwa “pihak yang untuk pertama kali mengajukan Permohonan dianggap sebagai pemegang hak Desain Industri, kecuali jika terbukti sebaliknya”

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi Pendesain ialah “seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri yang baru dan memiliki nilai estetis yang kemudian dapat diproduksi menjadi sesuatu. Sedangkan Pemegang Hak Desain Industri ialah seorang atau beberapa orang yang merupakan pendesain (kecuali diperjanjikan lain antara pendesain dengan pihak lain) atas suatu desain indutri yang mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pertama kali kemudian diberikan hak kepemilikan atas desain indutri tersebut secara sah dengan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri”.

### 1. Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Sistem pendaftaran HKI pada umumnya sebagaimana digunakan dalam bidang Merek terdiri dari dua sistem, yakni Sistem Deklaratif dan Sistem Konstitutif. Sistem pendaftaran deklaratif ialah “suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan, tetapi menimbulkan ketidak pastian hukum, sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila pihak lain dapat memberikan bukti-bukti bahwa dia adalah pemilik pertama yang merknya telah didaftarkan sebelumnya”. Sedangkan sistem konstitutif menekankan, bahwa pendaftaran adalah suatu keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek, sehingga adanya kepastian hukum untuk mengondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang utama untuk dilindungi, dan juga adanya kepastian hukum pembuktian, sebab di dasarkan pada fakta pendaftaran sebagai alat bukti utama.

Menurut Yahya Harahap, “penegakan pendaftaran mengandung konsepsi sistem dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek lainnya, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan pula doktrin pemakai pertama atau *prior user (first to use system)*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan sebagai pemakai pertama sesungguhnya”. Penjelasan Umum tersebut memberikan kedudukan yang utama terhadap asas *prior user has a better right* atau pemakaian pertama memiliki hak yang lebih baik dari pendaftar pertama.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, Citra Adityabakti, Bandung, h. 335-336

Desain Industri dalam proses permohonan pendaftaran disertai dengan serangkaian proses pemeriksaan. Pada dasarnya dalam Undang-Undang Desain Industri dikemukakan bahwa dalam pemeriksaan permohonan hak atas desain industri teranut Asas Kebaruan dan Pengajuan Pendaftaran Pertama. Dengan diikutinya Prinsip Pengajuan Pendaftaran Pertama (*first to file*), maka sistem permohonan pendaftaran Desain Industri termasuk sistem Konstitutif, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 “UU Desain Industri tahun 2000.” Permohonan pendaftaran desain industri merupakan langkah untuk memperoleh hak atas desain industri tersebut yang berupa Sertifikat Desain Industri. Sehingga tidak timbul kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama Desain Industri tersebut.

“Mengetahui proses ataupun persyaratan permohonan pendaftaran diatur dalam Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) UU Desain Industri tahun 2000,” yang disebutkan sebagai berikut:

- (1) “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Permohonan harus memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan



- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampiri dengan:
  - a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya;
  - b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.
- (5) Dalam hal Permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu Pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon lain.
- (6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh bukan Pendesain, Permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa Pemohon berhak atas Desain Industri yang bersangkutan. “

Permohonan juga dapat dilakukan dengan Hak Prioritas yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UU Desain Industri tahun 2000, “Hak Prioritas adalah salah satu prinsip dalam Konvensi Paris. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Prioritas yang berasal dari negara yang tergabung pada Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan dari negara tujuan (yang juga anggota Konvensi Paris) seolah-olah pengajuan dilaksanakan pada tanggal pengajuan yang pertama kali”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.267



Permohonan dengan Hak Prioritas ini harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang sudah disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia pada waktu paling lama 3 (tiga) bulan dihitung setelah berakhirnya jangka waktu mengajukan permohonan dengan hak prioritas.<sup>4</sup> Jika terjadi kekurangan syarat-syarat dan kelengkapan permohonan, maka Direktorat Jenderal HKI wajib memberitahu kepada pemohon atau kuasanya untuk dapat melengkapi kekurangan atau kelengkapan tersebut dalam waktu 3 bulan yang terhitung sejak dikirimnya surat pemberitahuan kekurangan tersebut.

## 2. Lingkup Hak atas Desain Industri

Lingkup hak dalam setiap bidang HKI berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nya masing-masing. Desain Industri lingkup hak yang dimaksud sesuai dengan Pasal 9 “UU Desain Industri tahun 2000,” yakni:

Pasal 9 ayat (1) “Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri”. Maksud dari pasal 9 ayat (1) ini ialah pemegang Hak Desain Industri berhak untuk melakukan apapun atas produk yang diberikan hak, baik membuat, memakai, menjual, atau mengimpornya, ataupun ingin memberikan hak pada pihak ketiga untuk melakukannya.

---

<sup>4</sup> H. OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.475

Dan Pasal 9 ayat (2) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak Desain Industri”.

Beberapa pengecualian yang tidak dapat dilindungi Desain Industri. Produk cetakan seperti, buku, kalender, sertifikat, dan lain-lain bukan merupakan domain perlindungan desain industri karena meski diproduksi atau dibuat secara masal, sudah memperoleh perlindungan di bawah hak cipta. Warna semata tidak dapat dilindungi oleh desain industri, akan tetapi kombinasi warna yang diterapkan pada produk dapat dilindungi Desain Industri.<sup>5</sup>

Dengan dijelaskannya lingkup hak atas desain industri ini memberikan kepastian apa saja yang termasuk hak serta perlindungan yang didapat oleh Pendesain dan atau Pemegang Hak Desain Industri atas desain industrinya.

### 3. Sistem Perlindungan dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Desain Industri

Konsep dasar perlindungan HKI didasari oleh beberapa prinsip, yakni sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. “Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*)

---

<sup>5</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, h.258

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 1982, Cetakan pertama, Bina Cipta, Bandung, h.24

Pencipta sebuah karya, yang membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar untuk mendapatkan imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui hasil karyanya.

b. Prinsip ekonomi (*the economic principle*)

Hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari pemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan.

c. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Pengakuan atas karya, karsa, cipta manusia sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru yang berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hak apapun yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.”

Sistem perlindungan HKI di segala bidang pada dasarnya diberikan setelah pihak melakukan pendaftaran kepemilikan artinya perlindungan hukum terhadap karya intelektual mensyaratkan adanya kewajiban melakukan pendaftaran. Akibat hukum, apabila tidak melakukan pendaftaran penghasil karya intelektual tidak dapat menuntut pihak lain yang menggunakan karya intelektual tersebut tanpa seijinnya.

Sama seperti sistem perlindungan HKI bidang Desain Industri, perlindungan atas desain industri dapat dijalankan atau diberikan apabila si pendesain atau pihak lain (yang diberikan ijin oleh pendesain untuk mendapatkan hak desain industri) telah mendaftarkan

dan permohonan pendaftaran tersebut diterima kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri.

Dalam Pasal 26 paragraf 2 *TRIPs Agreement* yang mengatur soal perlindungan, menyatakan bahwa para peserta dapat mengadakan pengecualian terhadap perlindungan dari desain industri. Akan tetapi pengecualian ini tidak dapat secara kurang wajar (*not unreasonably*) bertentangan dengan eksploitasi secara normal dari Desain Industri yang dilindungi itu.<sup>7</sup>

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri, ”perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Dan yang dimaksud tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan tersebut yakni setelah dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan telah diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri”.

Perlindungan Desain Industri setelah 10 tahun tidak dapat diperpanjang, kemudian desain industri tersebut akan menjadi milik umum atau masyarakat (*public domain*). Yang dimana setelah waktu perlindungan tersebut habis, masyarakat secara umum dapat membuat, menjual atau menggunakan desain tersebut tanpa perlu meminta izin si pendesain atau membayar kepada pendesain.

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2004, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.21

Ketentuan jangka waktu perlindungan 10 tahun dan tidak bisa diperpanjang dalam “UU Desain Industri tahun 2000 sama dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) *TRIPs Agreement*.”

### C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasar pada Peraturan Daerah Nomer. 4 Tahun 2013, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Perda Walikota Blitar Nomor. 32 Tahun 2014, tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, “sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut”:

1. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perindustrian,
2. Penanaman Modal dan Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Peng-koordinasian penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan dan mengelola administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pada bidang administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, kehumasan, perlengkapan, dan pelaksanaan tugas dinas.
7. Melaksanakan pengembangan kemampuan berorganisasi meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, administrasi umum, dan sarana prasarana kerja.
8. Menyelenggarakan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.



9. Menyelenggarakan standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan wewenang Daerah.
10. Menyusunan dan Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pablik (SPP).
11. Melaksanaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
12. Melaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau melaksanakan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
13. Pengelolaan aduan masyarakat di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal.
14. Penyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya,terkait layanan di bidang Penanaman Modal, Perdagangan, dan Perindustrian, secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah.
15. Melaksanakan kordinasi, evaluasi, monitoring, dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Penanaman Modal.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang disematkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris dan 3 Kepala Bidang yaitu Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bidang promosi, Bidang Perdagangan, Penanaman Modal dan HAKI terdiri atas Sekretaris 2 (dua) sub bagian serta 3 (tiga) bidang yang masing-masingnya bidang terdiri dari 2 (dua) seksi dengan tugas pokok serta fungsinya sebagai berikut:



1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan.
2. Sekretaris mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi perencanaan, pengelolaan administrasi umum, peng-koordinasian program kerja unit kerja, rumah tangga, kearsipan, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan di lingkungan Dinas serta fungsinya:
  - a. Peng-koordinasian perumusan kebijakan teknis didasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.
  - b. Peng-koordinasian serta mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perogram kerja masing-masing bidang secara terpadu.
  - c. Peng-koordinasian serta memfasilitasi kelancaran melaksanakan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas.
  - d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan penyusunan program atau kegiatan Sekretariat.
  - e. Peng-koordinasian dan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja).
  - f. Peng-koordinasian dan Penyusunan Rencana KerjaAnggaran (RKA).
  - g. Peng-koordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).
  - h. Memasilitasi Penyusunan Penetapan Kinerja (PK).
  - i. Peng-koordinasian internal dan eksternal serta tatalaksana organisasi Dinas dan pembinaan penyelenggaraan organisasi.

- j. Peng-koordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan Tata Usaha Dinas.
- k. Peng-koordinasian dan fasilitasi tugas-tugas keprotokolan, pengelolaan administrasi perjalanan Dinas, dan kehumasan.
- l. Peng-koordinasian dan memfasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, keamanan kantor, sarana prasarana, dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas.
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan/pembelian atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi dan tugas pokok.
- n. Memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang mana dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.
- o. Memfasilitasi penyusunan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- p. Peng-koordinasian pengusulan tata laksana, penataan organisasi, dan produk hukum lainnya.

Sekretariat mempunyai 2 sub bag terdiri dari:

- Sub Bag Umum,Kepegawaian dan kearsipan mempunyai tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan dan menganalisis data sebagai bahan merumuskan kebijakan operasional administrasi umum.
  - b. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai dasar koordinasi dan pembinaan administrasi umum.

- c. Menyusun serta melaksanakan rencana program dan atau kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan.
- d. Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum.
- e. Melaksanakan dan mengelola surat menyurat tata kearsipan.
- f. Melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, upacara, protokoler, dan rapat dinas.
- g. Mengelola administrasi perjalanan dinas dan kehumasan.
- h. Melaksanakan urusan kebersihan, keamanan, dan tata laksana.

- Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas-tugas dan fungsi-fungsi:

- a. Menyiapkan, pengumpulan dan menganalisa data sebagai bahan merumuskan kebijakan operasional di bidang administrasi keuangan dan program.
- b. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan koordinasi dan membina administrasi keuangan dan program.
- c. Melaksanakan peng-koordinasian penyusunan rencana program dan rencana anggaran yang mencakup rencana anggaran operasional dan rencana anggaran kegiatan pada masing-masing unit di Lingkungan Dinas.
- d. Menyusun serta melaksanakan rencana program atau kegiatan administrasi keuangan dan program.
- e. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

3. Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM),berdasar peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas.
- b. Penyusunan program atau kegiatan di bidang Perindustrian dan Energi Sumber daya Mineral (ESDM).
- c. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan bina usaha perindustrian.
- d. Menyiapkan data sebagai bahan menyusun standar, norma, prosedur dan kriteria bina usaha perindustrian dan ESDM.
- e. Peng-koordinasian dan penyelenggaraan pelayanan bina usaha Perindustrian dan ESDM.
- f. Melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan pada aneka usaha industri dan bidang perindustrian,
- g. Melaksanakan koordinasi dukungan dan memfasilitasi aktivitas pada usaha perindustrian dan aneka usaha industri.
- h. Melaksanakan Bimbingan teknis usaha industri serta mendorong meningkatnya kemampuan berusaha yang khususnya industri kecil menengah.

Bidang Industri dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai 2 (dua) Seksi terdiri atas:

- Seksi Aneka Industri dan Agro Industri yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program kerja kepada seksi Aneka Industri dan Agro Industri
  - b. Penyusunan program atau kegiatan di bidang Aneka Industri dan Agro Industri,
  - c. Perumusan kebijakan tehnis Aneka Industri dan Agro Industri;

- d. Pembinaan dan pengembangan usaha dari segi aspek permodalan, manajemen, dan pemasaran di bidang Aneka Industri dan Agro.
- e. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan asosiasi industri;
- f. Pelaksanaan pengumpulan analisis data, serta diseminasi data sebagai bahan penyusunan laporan di bidang Aneka Industri dan Agro Industri;
- g. Pelaksanaan gelar produksi Aneka Industri dan Agro Industri kecil menengah;
- h. Pelaksanaan pembinaan produksi yang berhubungan dengan peningkatan mutu, standarisasi produktifitas dan efisiensi, pengembangan desain maupun diversifikasi produk Aneka Industri dan Agro Industri

- Seksi Industri Logam, Mesin, Kimia dan ESDM yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan Bahan penyusunan perencanaan dan perogram kerja pada seksi Industri, logam, Mesin, Kimia, dan ESDM.
- b. Penyusunan program atau kegiatan di bidang Industri Logam, Mesin, Kimia dan ESDM.
- c. Perumusan kebijakan teknis industri Logam, Mesin, Kimia dan ESDM.
- d. Pembinaan dan mengembangkan usaha dari aspek manajemen di bidang industri logam, Mesin, Kimia.
- e. Pelaksanaan pengumpulan, analisa data, diseminasi data sebagai bahan untuk penyusunan laporan di bidang Industri logam, Mesin, Kimia.
- f. Pelaksanaan gelar prodak Industri Logam, Mesin, Kimia



g. Pelaksanaan pembinaan produksi yang berhubungan dengan peningkatan standarisasi, mutu, efisiensi dan produktifitas, pengembangan desain maupun diversifikasi produk industri Logam, Mesin, Kimia.

4. Bidang Perdagangan yang mempunyai tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perdagangan berdasar peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program atau kegiatan di bidang Perdagangan;
- c. Membina manajemen, modal, pemasaran, pengelolaan usaha, dan sarana usaha kepada pedagang non formil atau pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil serta PKL.
- d. Memfasilitasi bantuan Modal, dan sarana usaha untuk pedagang non formal atau pedagang golongan ekonomi lemah, pengembangan kerja sama dan PKL, serta pedagang kecil dan PKL;
- e. Mengembangkan kerja sama bersama PKL, pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan.
- f. Mempersiapkan pembinaan perdagangan dalam rangka mempromosikan produksi dalam negeri;
- g. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi, kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

Bidang Perdagangan terdiri 2 (dua) Seksi yaitu:



- Seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan dengan tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi adalah sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan Program kerja kepada seksi Fasilitasi Peningkatan Perdagangan;
  - b. Pengumpulan dan menganalisa data-data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan binausaha perdagangan;
  - c. Penyusunan rencana program dan/atau kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perdagangan.
  - d. Mempersiapkan data-data sebagai bahan penyusunan norma, prosedur, standart, dan kriteria bina usaha perdagangan
  - e. Mempersiapkan data sebagai bahan untuk pembinaan manajemen, pemasaran, modal, pengelolaan Usaha, dan sarana usaha kepada pedagang non-formal atau pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan PKL
  - f. Mempersiapkan bahan bantuan modal, dan sarana usaha pada pedagang non formal atau pedagang golongan ekonomi lemah, pedagang kecil dan PKL;
  - g. Mempersiapkan bahan pembinaan, monitoring, pengawasan, evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitasi harga;
- Seksi Perlindungan Konsumen dengan tugas-tugas pokok dan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan bahan untuk penyusunan perencanaan dan program kerja kepada seksi Perlindungan Konsumen;
  - b. Pengumpulan dan menganalisis data sebagai bahan koordinasidan pembinaan Perlindungan Konsumin;
  - c. Penyusunan rencana program dan atau kegiatan Perlindungan Konsumen;

- d. Mempersiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standart, prosedur dan kreiteria Perlindungan Konsumen;
- e. Mempersiapkan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perlindungan Konsumen;
- f. Memberikan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah mendapat penilaian dari pemerintah yang didasarkan oleh rekomendasi provinsi;

Bidang Promosi dan Penanaman Modal yang mempunyai tugas-tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan serta perogram kerja Bidang Promosi dan Penanaman Modal;
- b. Merumuskan kebijakan teknis Promosi dan Penanaman Modal;
- c. Melaksanakan pengkajian di bidang Penanaman Modal
- d. Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan dan pelaksanaan perkembangan penanaman modal;
- e. Memfasilitasi kegiatan pameran dan promosi serta menyampaikan informasi perdagangan dan industrial di tingkat lokal, nasional dan internasional.
- f. Melaksanakan pemberian informasi perdagangan, industri, pengusaha kecil serta menengah melalui media liflet, spanduk, website, katalog, papan sarana promosi;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta serta lembaga asosiasi terkait lainnya dalam rangka penanaman modal dan kegiatan promosi.

Bidang Promosi dan Penanaman modal terdiri dari 2 (dua) Seksi adalah sebagai berikut:

- Seksi Promosi dan Pemasaran yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program kerja kepada Seksi Promosi dan Penanaman Modal;
  - b. Pengumpulan dan menganalisis data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan Seksi Promosi dan Pemasaran;
  - c. Penyusun rencana perogram dan atau kegiatan seksi Promosi dan Pemasaran;
  - d. Mempersiapkan data sebagai bahan penyusunan standart, norma, prosedur dan kreteria Promosi dan Pemasaran.
  - e. Menyiapkan dan mengusulkan kegiatan-kegiatan pameran dan promosi serta menyampaikan informasi industri dan perdagangan baik lokal, nasional, dan internasional;
  - f. Menyiapkan pelaksanaan pameran perdagangan, industri, pengusaha kecil dan menengah.
- Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dengan tugas-tugas dan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. Mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perogram kerja kepada Seksi Fasilitasi Penanaman Modal dan Hki
  - b. Pengumpulan dan mengelola data Penanaman Modal;
  - c. Mempersiapkan rumusan naskah rancangan Peaturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota tentangPenanaman Modal;
  - d. Mensosialisasikan pelaksanaan peraturan perundangan-perundangan terkait Penanaman Modal dan Hki.

- e. Pelaksanaan analisa Iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dalam rangka mengembangkan penanaman modal;
- f. Pelaksanaan persiapan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah sesuai dengan program pembangunan daerah, berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi;
- g. Pelaksanaan persiapan penyusunan peta investasi daerah serta identifikasi potensi sumber daya daerah terdiri atas sumber daya alam atau SDA, kelembagaan dan sumber daya manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar.
- h. Pelaksanaan promosi penannaman modal daerah, baik di dalam negeri maupun luar negeri;



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis berarti kenyataan hukum atau kepastian hukum, sedangkan empiris berarti keadaan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar,” kemudian melakukan penganalisaan terhadap hasil penelitian tersebut terhadap peraturan perundang-undangan.

##### **B. Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu dan atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Dilakukan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum itu, untuk kemudian diusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahannya yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji duduk permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.<sup>1</sup>

##### **C. Lokasi Penelitian**

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, h. 43.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar yang berada di Jalan Sumatera No. 38A Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Hal ini dikarenakan Disperindag Kota Blitar merupakan instansi Pemerintah Kota Blitar yang disertai wewenang dalam hal pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.”

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni Pihak Disperindag Kota Blitar dan pendesain kendang jimbe di Kota Blitar dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan kendang jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.”

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, media cetak, media elektronik, dokumen-dokumen, dan penelusuran situs internet dengan mempelajari dan menganalisa data yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dimaksud adalah agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan akurat sehingga teknik yang digunakan, yaitu:



a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui tatap muka serta tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan atau tanya jawab secara langsung yaitu dengan Kepala Disperindag Kota Blitar dan 2 orang pendesain kendang jimbe di Kota Blitar. Peneliti mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman sehingga selalu diarahkan pada pokok permasalahan.<sup>2</sup>

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi peneliti.

c. Observasi

Mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang gejala permasalahan yang sedang diteliti. Pengamatan dilakukan terhadap obyek yang dituju yang dapat dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan ialah teknik deskriptif analisis, yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan gamblang mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.107.

berlaku, dan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

## **G. Definisi Operasional**

### **a. Desain Industri**

Desain industri merupakan suatu kreasi atau tentang bentuk, komposisi garis, atau konfigurasi atau warna, atau garis warna, atau gabungan darinya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis serta dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang, produk, kerajinan tangan, atau komoditas industri.



b. Hak Desain Industri

Hak Desain Industri merupakan hak eksklusif yang disematkan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada terhadap pihak lain untuk dilaksanakannya hak tersebut. Hak desain industri dikaitkan sebagai hak eksklusif karena hanya pendesainnya saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara.

c. Pendesain

Pendesain merupakan seorang atau beberapa orang yang telah menghasilkan desain industri yang baru dan memiliki nilai estetis yang kemudian dapat diproduksi menjadi sesuatu. Sedangkan Pemegang Hak Desain Industri ialah seorang atau beberapa orang yang merupakan pendesain (kecuali diperjanjikan lain antara pendesain dengan pihak lain) atas suatu desain industri yang mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pertama kali kemudian diberikan hak kepemilikan atas desain industri tersebut secara sah dengan dikeluarkannya Sertifikat Desain Industri.

d. Kendang Jimbe

“Jimbe merupakan salah satu jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, sejenis dengan kendang dan terbuat dari yang bentuknya seperti gelas dan ditutup oleh kulit hewan, memiliki tali yang diikatkan berfungsi sebagai pengencang. Alat musik ini merupakan warisan budaya yang asalnya dari kerajaan Mali afrika, yang ada pada abad XII. Jimbe seolah menjadi cikal bakal pembuatan drum di dunia. Awal adanya jimbe pada jaman dahulu yaitu bertujuan sebagai alat komunikasi antara desa satu dengan desa yang lain. Lalu jimbe berkembang dan digunakan sebagai alat musik pada acara-acara upacara tradisional.”

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebaga berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Berisi latar belakang permasalahan; rumusan masalah; tujuan penelitian yang memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian; manfaat penelitian yang menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian; sistematika penulisan yang akan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

### BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian umum, yang berisi teori atau pendapat sarjana yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori atau pendapat sarjana tersebut diperoleh dari studi kepustakaan.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis.

### BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

## BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan dan saran yang didasarkan pada hasil kajian.

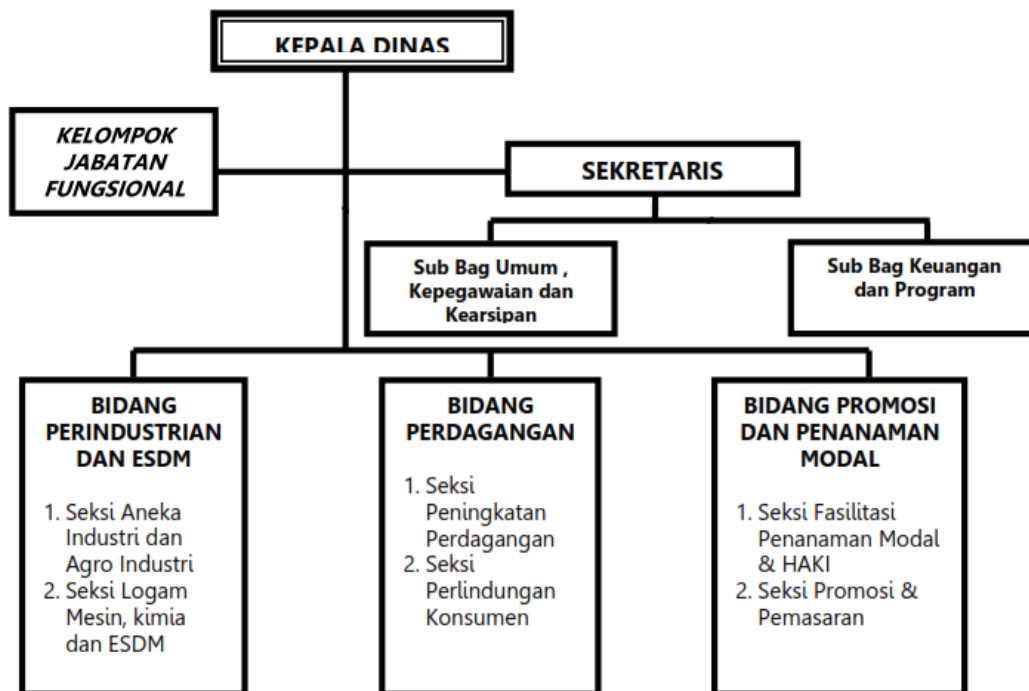


## BAB IV

### ANALISA DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Sebagai usaha dan upaya untuk tercapainya visi dan misi yang ada, ditentukan pengimplementasian tugas dan fungsi yang berbentuk kegiatan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang merupakan unsur lini di Pemerintahan Kota Blitar secara struktural. Formulasi ini pencerminan hubungan kerja, sesuai dengan stuktur organisasi yang telah ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar pencapaian kinerja dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 32 Tahun 2014, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja.



Sumber: Disperidag Kota Blitar, 2018



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

### 1. Sumber Daya Manusia(SDM) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar pada tahun 2015 sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON	JUMLAH
<b>Eselon II</b>	<b>1</b>
<b>Eselon III</b>	<b>4</b>
<b>Eselon IV</b>	<b>8</b>
<b>Total</b>	<b>13</b>

Sumber: Disperindag Kota Blitar, 2018

Tabel 2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	1 Orang
Pembina (IV/a)	3 Orang
Penata Tk. I (III/d)	7 Orang
Penata (III/c)	2 Orang
Penata Muda Tk.I (III/b)	4 Orang
Penata Muda (III/a)	2 Orang
Pengatur Tk.I (II/d)	0 Orang
Pengatur (II/c)	4 Orang
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	3 Orang
Pengatur Muda (II/a)	1 Orang
Jumlah	27 Orang

Sumber: Disperindag Kota Blitar, 2018

Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
S.2	1
S.1	16
SLTA	8
SLTP	2
SD	-
Total	27

Sumber: Disperindag Kota Blitar, 2018

Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
Laki-laki	13
Perempuan	14
Total	27

Sumber: Disperindag Kota Blitar, 2018



## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

“Berkembangnya Industri Kecil Menengah serta Meningkatnya Iklim Perdagangan dan Pemasaran yang Kondusif”.

“Bahwa dengan melalui peningkatan peran Perindustrian, Perdagangan dan Promosi dan Penanaman Modal diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing serta memperluas kesempatan kerja untuk mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang Mandiri, Produktif dan Berdaya Saing dalam mengelola Sumber Daya yang ada”.

### b. Misi

- 1) “Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan daya saing Industri Kecil Menengah.
- 2) Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, dan perlindungan konsumen.
- 3) Meningkatkan Promosi dan Penanaman Modal untuk mewujudkan peningkatan perdagangan dan investasi”.

## 3. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

- 1) Meningkatkan peranan Industri di dalam perekonomian, sehingga mampu memperluas lapangan kerja serta kesempatan usaha dan meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing di pasar global.
- 2) Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri, serta pengawasan peredaran barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan kualitas perdagangan dan mewujudkan perdagangan yang indah, bersih, tertib, dan nyaman.
- 4) Meningkatkan pelayanan administrasi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur, Industri, dan Perdagangan.

b. Sasaran

- 1) Tercapainya peningkatan daya saing industrial dengan indikator pertumbuhan industri.
- 2) Terwujudnya Industri kecil, menengah dan industri rumah tangga yang semakin tumbuh dan kembang.
- 3) Tercapainya peningkatan volume perdagangan dan lancarnya jaringan distribusi barang dan jasa.
- 4) Tercapainya peningkatan perdagangan yang indah, bersih, tertib, dan nyaman.
- 5) Terwujudnya pelayanan administrasi, pembinaan, profesional aparatur, dan kedisiplinan pegawai.

#### 4. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

- 1) Meningkatnya pelayanan dan fasilitasi dalam meningkatkan daya saing industrial secara berkelanjutan serta meningkatnya upaya pengembangan industri unggulan daerah.
- 2) Meningkatkan ketrampilan, jaringan distribusi, dan teknologi proses serta menyediakan fasilitas, konsultasi dan informasi untuk industri (utamanya industri kecil) perdagangan untuk memperluas akses pasar dan daya saing.
- 3) Menyediakan layanan promosi yang bisa digunakan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan serta berpartisipasi aktif di dalam pameran-pameran.
- 4) Peningkatan peranan perdagangan dalam memacu perkembangan ekonomi.
- 5) Membina Lembaga Perdagangan, pengembangan usaha, dan Pendaftaran Unit Usaha.
- 6) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun Swasta dan Dunia usaha.
- 7) Meningkatkan kebersihan, ketertiban, dan keindahan dengan didukung oleh sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.
- 8) Mengikutsertakan Aparatur Negara yang berkompeten dalam berbagai diklat dan penekanan penerapan Good Governance.

b. Kebijakan

- 1) Meningkatkan Peranan Industri, Perdagangan dalam perekonomian sehingga mampu memperluas lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktifitas dan mampu bersaing di pasar global,



- 2) Meningkatkan perdagangan yang berkeadilan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan ketersediaan barang dan jasa, perlindungan kepentingan konsumen, kelancaran arus distribusi, dan produsen,
- 3) Meningkatkan Disiplin Aparatur Negara dalam pelayanan kepada masyarakat.

**B. Pelaksanaan Hak Desain Industri Pada Produk Kerajinan Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar**

Desain Industri ialah “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>1</sup> Adapun Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>2</sup> Sementara Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.<sup>3</sup>”

Terkait dengan individu dan/atau beberapa individu (kelompok) yang berhak mendapatkan hak desain industri diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang RI “Nomor 31 Tahun

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Pasal 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 5.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2.

2000 Tentang Desain Industri yang menyebutkan: (a) Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain; (2) Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.”

Penelitian ini membahas tentang Hak Desain Industri pada kerajinan Kendang Jimbe yang berada di Kota Blitar. Hal tersebut disebabkan perkembangan industri kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Blitar, telah menyampaikan bahwa, berdasarkan kenyataan yang ada dari sisi pelaku perusahaan bahwa dari tahun ke tahun perkembangan industri kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar semakin meningkat.<sup>4</sup> Pendapat yang sama dikemukakan pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar bahwa perkembangan industri kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar sangat pesat.<sup>5</sup>

Temuan yang menarik dari penelitian ini adalah menurut Disperindag Kota Blitar bahwa selama Kendang Jimbe dibuat di Kota Blitar, tidak pernah ada yang mengajukan hak kekayaan industri (HKI) kepada Disperindag Kota Blitar.<sup>6</sup> Hal yang sama dikemukakan oleh pihak Pendesain bahwa dirinya tidak pernah mengurus permohonan Hak Desain Industri atas produk Kendang Jimbe yang dibuatnya.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya minat

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

<sup>5</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jen selaku Pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar, tanggal 6 Nopember 2018.

<sup>6</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

<sup>7</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jen selaku Pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar, tanggal 6 Nopember 2018.

masyarakat pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar untuk melakukan pengajuan permohonan Hak atas Desain Industri atas produk kerajinan Kendang Jimbe yang diproduksinya.

Menurut pihak Disperindag Kota Blitar, hal tersebut dapat disebabkan prosedur pengurusan permohonan hak desain industri kendang jimbe di Kota Blitar dianggap memiliki syarat-syarat yang sulit dan biaya yang mahal sehingga tidak ada yang mau mematenkan hak desain tersebut. Secara umum, faktor yang menyebabkan pendesain kendang jimbe di Kota Blitar merasa enggan atau kurang berminat untuk mengajukan permohonan hak atas desain industri kendang jimbenya adalah biaya yang mahal, minimnya fasilitas, dan barang harus disesuaikan sesuai pesanan.<sup>8</sup>

Hal yang sama dikemukakan oleh pihak Pendesain bahwa tidak adanya permohonan hak desain industri kendang Jimbe dikarenakan masalah desain ditentukan dari hasil pesanan dan tidak ditentukan dari Pendesain itu sendiri. Padahal menurut pihak Pendesain, hak desain industri Kendang Jimbe dipandang penting dalam industri kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar, sebab Pendesain punya ciri khas desain yang dibuat, akan tetapi pendesain tidak bisa memasarkan desainnya dikarenakan desain yang dibuat harus sesuai dengan pesanan.<sup>9</sup>

Tidak adanya hak atas desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe Blitar tentu memiliki dampak negatif bagi industri dan pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar. Dampak bagi industri Kendang Jimbe Blitar adalah tidak terlalu merugikan industri karena

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

<sup>9</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jen selaku Pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar, tanggal 6 Nopember 2018.

Kendang Jimbe dibuat atas pesanan dan jika hasil karya tidak dilindungi maka sulit untuk menjadi pencipta. Adapun dampak bagi pendesain Kendang Jimbe adalah hasil karya Pendesain yang dibuat sendiri bisa dijiplak oleh Pendesain lainnya.<sup>10</sup> Hal yang sama diikemukakan oleh pihak Pendesain bahwa dirinya mengetahui dampak atau kerugian dari tidak adanya hak desain industri atas produk kerajinan Kendang Jimbe yang dibuatnya, yakni bisa dijiplak oleh orang lain.<sup>11</sup>

Sementara itu upaya yang telah dilakukan oleh Disperindag Kota Blitar dalam pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri adalah dengan memberikan sosialisasi di lapangan dan menjelaskan kepada Pendesain kalau hasil karya yang tidak dipatenkan akan bisa dijiplak oleh Pendesain lain.<sup>12</sup>” Upaya tersebut dibenarkan oleh pihak Pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar bahwa pihak Disperindag Kota Blitar pernah memberikan pengarahan tentang pentingnya HKI.<sup>13</sup>

Melihat kondisi tersebut, maka saran dari pihak Disperindag Kota Blitar agar para pendesain kendang jimbe di Kota Blitar antusias atau berminat untuk melakukan pengajuan permohonan hak atas desain industri Kendang Jimbe adalah pendesain harus selalu mengikuti sosialisasi jika anggota Disperindag memberikan pengarahan dan pendesain harus memberi

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

<sup>11</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jen selaku Pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar, tanggal 6 Nopember 2018.

<sup>12</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

<sup>13</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jen selaku Pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar, tanggal 6 Nopember 2018.

nilai tambah pada desain yang dibuat agar lebih variatif, dinamis sehingga konsumen tertarik dengan hasil karya yang dibuat pendesain.<sup>14</sup> Sedangkan saran pihak Pendesain kepada Disperindag Kota Blitar terkait pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar adalah selalu memberikan sosialisasi agar pendesain mengerti tentang pentingnya HKI sehingga pendesain mendapat arahan agar desain yang dibuat mendapat haknya.<sup>15</sup>

**C. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Hak Desain Industri pada Produk Kerajinan Kendang Jimbe Berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar”**

**1. Faktor-faktor yang Mendukung**

Peneliti menemukan setidaknya terdapat tiga faktor yang dapat mendukung pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar. Ketiga faktor pendukung tersebut adalah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak desain industri, dan adanya.

**a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak desain industri**

Faktor pertama yang mendukung pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar adalah adanya Undang-Undang RI “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.” Indonesia mengeluarkan undang-undang dibidang Desain Industri ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

<sup>15</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Jen selaku Pendesain kendang Jimbe di Kota Blitar, tanggal 6 Nopember 2018.



Pendesain dan menetapkan kewajiban serta menjaga agar pihak yang dalam hal ini tidak memiliki hak dapat menyalahgunakan hak Desain Industri tersebut.

Adanya peraturan ini bertujuan agar dapat menjadi suatu landasan yang efektif dalam berbagai bentuk pembajakan, penjiplakan, atau peniruan atas desain industri. Prinsip pengaturan dalam undang-undang ini adalah pengakuan hak milik atas karya intelektual, yang memiliki nilai estetik dan dapat diproduksi secara berulang serta berbentuk barang dua atau tiga dimensi. Perlindungan hukum yang ada dalam peraturan ini dimaksudkan agar dapat merangsang aktivitas kreatif oleh Pendesain untuk terus menciptakan desain baru yang inovatif. Negara Indonesia memberikan Perlindungan Hak Desain Industri, bila diminta melalui prosedur pendaftaran dari pendesain, ataupun badan hukum yang berhak atas Hak Desain Industri tersebut.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2005, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2000, Tentang Desain Industri. Pasal 11 ayat tujuh (7) Undang-Undang RI Nomer. 31 Tahun 2000, Tentang Desain Industri menentukan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Permohonan (permintaan pendaftaran Desain Industri) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Demikian pula, guna melaksanakan Undang-Undang Desain Industri tersebut, perlu diatur pula ketentuan yang berkaitan dengan permintaan pendaftaran Desain Industri, yaitu “pencatatan perubahan nama dan atau alamat Pemegang Hak Desain Industri, pencatatan



pengalihan Hak Desain Industri, dan pembatalan pendaftaran Desain Industri baik atas Permohonan Pemegang Hak Desain Industri maupun berdasarkan putusan Pengadilan”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dikeluarkanlah PP No. 1 Tahun 2005, Tentang Pelaksanaan “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri,” yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan mengenai pelaksanaan “Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.” Dalam PP tersebut, proses pendaftaran Desain Industri atau yang didefinisikan dalam Undang-undang sebagai “Permohonan”, dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi penerimaan Permohonan, pemeriksaan administratif terhadap persyaratan Permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif dalam hal terdapat keberatan atas suatu Permohonan oleh pihak ketiga, pemberian Sertifikat Desain Industri, pencatatan pada Daftar Umum Desain Industri dan pengumuman dalam Berita Resmi Desain Industri.

- b. Adanya perkembangan industri kerajinan Kendang Jimbe yang pesat di Kota Blitar

Industri kerajinan Kendang Jimbe merupakan salah satu industri komoditi andalan Kota Blitar. Pada 5 tahun terakhir, yakni tahun 2013-2017 industri kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama pada tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Industri Komoditi Andalan Kendang Jimbe di Kota Blitar, 2013-2017

Tahun	Kecamatan			Jumlah (unit)
	Sukorejo	Kepanjenkidul	Sananwetan	
2013	1	33	-	34
2014	1	35	-	36
2015	2	35	-	37
2016	1	84	-	85
2017	-	286	1	287

Sumber: Disperindag Kota Blitar dan BPS, 2018

Adanya peningkatan yang drastis mengenai jumlah industri kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar dalam kurun 5 tahun terakhir tentu menunjukkan adanya peluang yang besar dalam usaha kerajinan tersebut. Kondisi ini tentu sangat mendukung munculnya desain-desain terbaru dari kerajinan Kendang Jimbe. Banyaknya jumlah unit usaha kerajinan Kendang Jimbe juga menunjukkan banyaknya Pendesain yang semestinya dapat menjaga desain industrinya dengan mendaftarkan hak desain industri hasil karya mereka.

- c. Adanya perkembangan teknologi internet yang menunjang pemasaran *online* produk Kendang Jimbe

Munculnya teknologi internet secara otomatis turut mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial pada masyarakat. Media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang dapat mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Beberapa contohnya yaitu, blog, jejaring sosial, youtube, wiki dan lain-lain. Lewat media sosial, setiap orang dapat membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten-konten berita, foto, artikel, promosi, dan video. Selain lebih fleksibel serta luas cakupannya, lebih efisien dan efektif, cepat, interaktif, dan variatif. Dalam perkembangannya, media sosial bisa dimanfaatkan untuk bermacam kepentingan, mulai menjalin hubungan pertemanan, kampanye program tertentu (agama, sosial, pendidikan, lingkungan kesehatan, dan sebagainya), sampai promosi serta pemasaran produk atau jasa tertentu.

Media sosial kini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara meluas, jejaring sosial atau pada skala umum disebut dengan media sosial telah menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi. Kecepatannya di dalam menyalurkan berita menjadi pilihan masyarakat dunia di zaman informasi ini. Hal ini juga dimanfaatkan oleh para pengrajin Kendang Jimbe di Kota Blitar dalam menginformasikan dan mempermosikan produk-produk Kendang Jimbe hasil karyanya agar dapat diketahui, dilihat, dan dibeli oleh masyarakat konsumen baik di dalam maupun di luar negeri.

Pemasaran secara *online* sangat penting bagi pelaku usaha kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar karena tidak hanya sekedar pengembangan usaha, namun juga pengenalan produk ke masyarakat. Sistem pemasaran *online* tersebut sekarang sudah banyak digunakan pelaku usaha di berbagai daerah dan bisa diterapkan oleh para pengrajin Kendang Jimbe yang ada di Kota Blitar.

## 2. Faktor-faktor yang Menghambat

Pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar” yang dilakukan oleh Disperindag Kota Blitar mengalami beberapa kendala yang dapat menghambat kelancaran dari pelaksanaannya tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi Disperindag Kota Blitar dalam pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar, yaitu minimnya pengetahuan Pendesain tentang HKI, Pendesain sulit diajak berbicara karena sibuknya pekerjaan, dan Biaya permohonan hak desain industri relatif cukup mahal.<sup>16</sup>

Hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor kendala yang dihadapi oleh Disperindag Kota Blitar dalam Pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar,” yaitu:

a. Minimnya pengetahuan Pendesain tentang HaKI

Kondisi minimnya dan rendahnya kesadaran Pendesain Kendang Jimbe dalam mengurus HaKI sangat memprihatinkan. Keberadaan HaKI sangat penting sebagai bentuk perlindungan kepada para Pendesain Kendang Jimbe. Perlindungan HaKI diberikan terhadap objek merupakan karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia seperti hak merk, hak cipta dan desain industri. Bentuk perlindungan tersebut harus dipahami dan diketahui para Pendesain Kendang Jimbe.

Minimnya kesadaran Pendesain Kendang Jimbe dalam mengurus dan memiliki hak

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Setyono selaku Kepala Seksi Perindustrian Disperindag Kota Blitar, tanggal 7 Nopember 2018.

desain industri dikarenakan rendahnya pengetahuan. Selain itu juga disebabkan minimnya informasi yang diterima para Pendesain Kendang Jimbe. Oleh karena itu, para Pendesain Kendang Jimbe perlu mendapatkan sosialisasi dan informasi yang lebih intensif dari pihak Disperindag Kota Blitar.

Usaha untuk mendorong para Pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar memiliki hak desain industri sangat dibutuhkan, sebab telah banyak produk yang dihasilkan atau diciptakan oleh Pendesain Kendang Jimbe. Jadi desain dari produk-produk Kendang Jimbe tersebut perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan karena bisa saja hak desain mereka diklaim oleh pihak lain. Kepemilikan hak desain industri tidak hanya sebagai perlindungan saja, tetapi juga memberikan sisi keuntungan bagi Pendesain Kendang Jimbe. Salah satunya berkaitan dengan sisi ekonomis dari suatu kreatifitas intelektual. Keuntungan ekonomis didapat Pendesain Kendang Jimbe apabila desain hasil karya mereka dipakai pihak lain. Penggunaan itu harus mendapatkan izin dan membayar hak desain industri pada pemiliknya. Sisi ini juga belum banyak diketahui oleh para Pendesain Kendang Jimbe.

Minimnya pengetahuan Pendesain Kendang Jimbe tentang HaKI khususnya hak desain industri menjadikan kerajinan Kendang Jjimbe asal Kota Blitar sangat berpotensi untuk mudah dibajak. Minimnya pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para investor asing dengan kekuatan modal yang besar untuk memperkenalkan industri kerajinan Kendang Jjimbe asal Kota Blitar tanpa memberdayakan pengusaha lokal.



- b. Pendesain sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat berkonsultasi

Tak hanya dikenal sebagai Kota Pariwisata, dibidang perdagangan pun Kota Blitar juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satunya adalah industri kerajinan dari bahan kayu, terutama Kendang Jimbe. Daerah yang cukup terkenal sebagai penghasil Kendang Jimbe adalah Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di daerah ini sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin kendang, juga merupakan sentra kerajinan bubut di Kota Blitar.

Kota Blitar memiliki 287 unit industri kerajinan Kendang Jimbe dengan kurang lebih 1.500 pekerja. Setiap unit industri pengrajin kendang ada antara 2-30 orang pekerja. Industri dibidang kerajinan kendang jimbe ini paling banyak adalah industri rumahan dengan tenaga kerja berasal dari keluarga.

Kegiatan usaha kerajinan kendang ini sudah ada sejak tahun 1974. Berkat kerajinan usaha kendang ini Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar menjadikan kawasan ini sebagai kampung wisata. Kendang Jimbe produksi Kota Blitar sudah diekspor hingga ke Australia dan Cina. Tak kurang dari 1500-4500 buah kendang jimbe diekspor ke Cina setiap bulannya. Harga kendang jimbe ini bervariasi mulai dari Rp.100 ribu hingga Rp.550 ribu per buah, tergantung jenis dan ukurannya. Untuk kendang jimbe yang bermotif *painting* atau polos dijual mulai Rp.100 ribu sampai Rp. 400 ribu. Sedangkan yang bermotif ukiran dibandrol paling mahal, yakni Rp.500 ribu.



Bapak Jen selaku salah satu pelaku usaha dan pendesain Kendang Jimbe menyatakan bahwa setiap bulan harus mengirim rata-rata 3.500 Kendang Jimbe ke Cina. Untuk memenuhi pesanan tersebut, beliau sekarang memiliki sebanyak 30-an orang pekerja. Dapat dibayangkan betapa sibuknya Bapak Jen bersama dengan para pekerjanya untuk memenuhi pesanan ekspor setiap bulannya. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa usaha kerajinan Kendang Jimbe di daerah tersebut.

Kondisi tersebut kemudian membuat para pelaku usaha dan Pendesain Kendang Jimbe tidak memiliki banyak waktu luang untuk berkonsultasi atau mendaftarkan desain produknya agar mendapatkan hak desain industri. Kerajinan kendang merupakan industri komoditi andalan paling besar di Kota Blitar sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Industri Komoditi Andalan per Kecamatan di Kota Blitar, 2017

Industri Komoditi Andalan <i>Primary Commodity Manufacturing</i>	Kecamatan/Subdistrict			Jumlah <i>Total</i>
	Sukorejo	Kepan- jenkidul	Sanan- wetan	
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )
1. Kendang <i>Traditional Drums</i>	-	286	1	287
2. Bubutan Kayu <i>Wood Lathe</i>	3	156	13	172
3. Sambel Pecel <i>Pecel Sauce</i>	13	9	3	25
4. Wajik Kletik <i>Traditional Gummies</i>	-	3	3	6
5. Tempe dan Tahu <i>Tempeh and Tofu</i>	177	5	9	191
6. Olahan Belimbing <i>Star Fruit Product</i>	4	1	-	5
7. Batik <i>Batik</i>	33	37	13	83
8. Opak Gambir dan Koya <i>Traditional Opak</i>	21	1	21	43

Sumber: Disperindag Kota Blitar dan BPS, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) industri komoditi andalan di Kota Blitar adalah industri kendang sebanyak 287 usaha dengan sentranya di Kecamatan Kepanjenkidul, industri tahu dan tempe sebanyak 191 usaha dengan sentranya di Kecamatan Sukorejo, serta industri bubutan kayu sebanyak 172 usaha dengan sentranya di Kecamatan Kepanjen kidul. Selain ketiga industri komoditi andalan tersebut, industri komoditi lainnya di Kota Blitar adalah batik, opak gambir dan koya, sambel pecel, wajik kletik, dan olahan belimbing.

c. Biaya permohonan hak desain industri relatif cukup mahal

Hak desain industri diatur dalam "UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri." Sesuai pada isi Pasal 6 dalam "UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri bahwa yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain."

Pemegang hak desain industri, memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya, dan berhak melarang orang lain tanpa sepersetujuannya membuat, memakai, menjual, dan mengedarkan barang-barang yang diberikan hak desain industri, kecuali untuk kepentingan-kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan oleh pemegang hak desain industri tersebut.

Menurut pihak Disperindag Kota Blitar bahwa "cara paling efektif untuk mendaftarkan hak desain industri bisa langsung melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Disperindag setempat".

Adapun prosedur permohonan mendaftarkan hak desain industri, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) secara tertulis.

2. Surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon serta dilampiri gambar atau foto,serta uraian dari desain industri yang dimohonkan, surat pernyataan,bahwa desain industri yang ingin didaftarkan merupakan milik asli si pemohon atau pendesain.
3. Pengisian formulir permohonan yang di dalamnya harus dituliskan waktu surat permohonan dibuat(tanggal, bulan, dan tahun), identitas diri (nama, alamat lengkap, status kewarganegaraan), nama dan alamat lengkap kuasa, bila permohonan diajukan melalui kuasa.
4. Apabila permohonan diajukan secara berbarengan oleh lebih dari satu pemohon, permohonan tersebut ditanda tangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan yang tertulis dari pemohon lain.
5. Jika permohonan yang diajukan bukan oleh pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti-bukti kuat bahwa pemohon berhak atas desain industri yang diajukan pendaftarannya.
6. Membayar biaya administrasi permohonan sebesar Rp.300.000 untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Rp.600.000 untuk yang non-UKM, untuk setiap permohonan.

Merunut pada pasal 5 UU Nomer. 31 Tahun 2000, ”perhitungan jangka waktu perlindungan terhadap hak desain industri diberikan selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan hak tersebut dari Dirjen HaKI. Sama halnya dengan jenis HaKI lainnya, hak desain industri pun dapat beralih dan dialihkan sesuai dengan kesepakatan perjanjian”.

Biaya administrasi permohonan hak desain industri sebesar 300 ribu hingga 600 ribu rupiah untuk satu jenis desain industri. Dapat dibayangkan ketika Pendesain mendaftarkan

sebanyak 10 (sepuluh) desain, maka biaya yang dikeluarkan menjadi sekitar 3-6 juta rupiah. Tentu nilai sebesar itu cukup mahal bagi para pelaku usaha dan Pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar. Hal ini tentu patut menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Disperindag Kota Blitar agar dapat memberlakukan biaya permohonan hak desain industri yang terjangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar” berjalan belum maksimal. Hal ini dikarenakan selama Kendang Jimbe dibuat di Kota Blitar, tidak pernah ada satu orang atau kelompok orang pun yang mengajukan hak kekayaan industri (HaKI) kepada Disperindag Kota Blitar. Hal ini dikarenakan desain yang dibuat harus sesuai dengan pesanan. Dampaknya adalah kondisi ini berpotensi besar timbulnya peluang penjiplakan karya desain Kendang Jimbe oleh siapapun.
2. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mendukung pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.” *Pertama*, adanya peraturan perundangundangan yang mengatur hak desain industri. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang “No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Pengaturan Desain Industri” untuk memberikan dasar pengetahuan bagi perlindungan yang baik terhadap berbagai bentuk peniruan, pembajakan, yang saat ini telah di kenal secara luas. Pemerintah juga menerbitkan PP No. 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang “Nomor 31 Tahun 2000 Tentang



Desain Industri,” untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan mengenai pelaksanaan Undang-undang “Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.”

*Kedua*, adanya perkembangan industri kerajinan Kendang Jimbe yang pesat di Kota Blitar. Banyaknya jumlah unit usaha kerajinan Kendang Jimbe juga menunjukkan banyaknya Pendesain yang semestinya dapat menjaga desain industrinya dengan mendaftarkan hak desain industri hasil karya mereka.

*Ketiga*, adanya perkembangan teknologi internet yang menunjang pemasaran produk Kendang Jimbe. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pengrajin Kendang Jimbe di Kota Blitar untuk menginformasikan dan mempromosikan produk Kendang Jimbe hasil karya mereka agar dapat dilihat, diketahui, dan dibeli oleh masyarakat konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

3. Terdapat 3 (tiga) faktor yang menghambat pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan Kendang Jimbe berdasarkan Pasal 6 “Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri di Kota Blitar.” *Pertama*, minimnya pengetahuan Pendesain tentang HaKI. Hal ini dapat menjadikan kerajinan Kendang Jimbe asal Kota Blitar sangat berpotensi untuk mudah dibajak. *Kedua*, Pendesain sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak sempat berkonsultasi. Tak kurang dari 1500-4500 buah Kendang Jimbe diekspor ke Cina setiap bulannya, yang membuat para pelaku usaha dan Pendesain Kendang Jimbe tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk berkonsultasi atau mendaftarkan desain produknya agar mendapatkan hak desain industri. *Ketiga*, biaya permohonan hak desain industri relatif cukup mahal, yakni sebesar 300 ribu hingga 600 ribu rupiah untuk satu jenis desain industri. Dapat

dibayangkan jika Pendesain mendaftarkan 10 (sepuluh) desain, maka biaya yang dikeluarkan menjadi sekitar 3-6 juta rupiah. Tentu nilai sebesar itu cukup mahal bagi para Pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Blitar melalui Disperindag Kota Blitar disarankan agar menetapkan biaya permohonan hak desain industri yang lebih murah, bahkan jika perlu digratiskan. Hal ini dimaksudkan untuk memancing minat para pelaku usaha dan Pendesain Kendang Jimbe untuk mendaftarkan desain produknya sehingga dapat terwujud perlindungan hukum bagi para Pendesain Kendang Jimbe di Kota Blitar.
2. Para pelaku usaha dan Pendesain kerajinan Kendang Jimbe di Kota Blitar disarankan agar membentuk komunitas atau paguyuban yang dapat memwadahi dan mewakili aspirasi mereka serta memiliki waktu untuk berkoordinasi dan bersinergi dengan Disperindag Kota Blitar dalam rangka meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, khususnya tentang hak desain industri.
3. Penelitian berikutnya disarankan agar mengembangkan hasil penelitian ini dengan mengkaji pelaksanaan hak desain industri pada produk kerajinan tradisional lainnya, seperti batik, *furniture*, ukiran dan sebagainya agar terwujud perlindungan hukum bagi para Pendesain atas desain produk hasil karyanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992*, Citra Adityabakti, Bandung, 1996.
- NK Supasti Dharmawan, dkk, *Bahan Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2009.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1982.

### Internet

- Aunur Rofiq, 14 Februari 2017, *Kendang Jimbe, Kerajinan Ikon Wisata Kota Blitar*, <http://www.jatimtimes.com/baca/151210/20170214/152737/kendang-jimbe-kerajinan-ikon-wisata-kota-blitar/>

## Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

